

RADIKALISME ISLAM: SEJARAH, KARAKTERISTIK, DAN DINAMIKA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Taufani Taufani

Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
taufani@iain-manado.ac.id, taufani1987@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to elaborate the history, characteristic, and dynamics of Radical Islam group in Indonesia. Post New Order era has opened political opportunity for radical Islam group to colour the Islamic and political dynamics in Indonesia. This study concluded that radicalism teaching was not something new in Islamic history. Radical Islam group could flourish due to the political openness milieu post New Order Era as well as the infiltration of radical Islam teaching rooted in Middle East into Indonesian Islam. To anticipate the strengthening of Radical Islam group influence in Indonesia, the collaboration between the state and the populace are highly needed.

Keywords: *Fundamentalism; Radicalism; Radical Islam.*

I. PENDAHULUAN

Citra Islam di dunia Barat telah tercoreng akibat terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang merobohkan salah satu gedung pencakar langit yang dimiliki Amerika. Sejak itu, media internasional sibuk memberitakan keterlibatan organisasi Islam radikal Al Qaeda dimana Osama bin Laden dianggap sebagai dalang utama di balik peristiwa ini. Citra Islam menjadi semakin terpuruk karena beberapa saat setelah itu, ledakan demi ledakan terjadi di berbagai belahan dunia lainnya, seperti di Bali, Jakarta, Inggris, Spanyol, dan beberapa negara lain yang menewaskan banyak manusia yang tak berdosa, termasuk umat muslim sendiri. Berbagai pihak mengutuk aksi biadab tersebut. Salah satu pihak yang sangat gencar mengutuk aksi terorisme biadab tersebut adalah pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin langsung oleh Presiden George W. Bush kala itu.

Bush lalu merespon aksi terorisme tersebut dengan mengirim pasukan militernya ke berbagai negara yang dicurigai sebagai tempat persembunyian para teroris termasuk Osama, seperti di Afghanistan, Pakistan, dan berbagai negeri Islam lainnya agar dampak terorisme tidak semakin menjalar ke negaranya. Sejak terjadinya peristiwa 11

September tersebut yang konon dilakukan oleh segelintir teroris yang mengatasnamakan Islam, citra Islam secara umum di mata dunia internasional menjadi tercoreng. Berbagai stereotip kemudian bermunculan, seperti Islam dianggap sebagai agama pedang, jahat, kolot, dan teroris sehingga berdampak pada munculnya fenomena islamofobia di dunia Barat. Sebagai implikasi atas adanya fenomena islamofobia tersebut, kaum Muslim yang hidup dan bermukim di negara Barat, mengalami berbagai perlakuan yang diskriminatif dari mereka yang memiliki kecenderungan anti-Islam. Parahnya, mereka semuanya dicurigai sebagai teroris dan penjahat kelas kakap yang sewaktu-waktu dapat meluluhlantakkan dunia Barat.

Sebelum terjadinya peristiwa 11 September, citra Islam memang telah banyak disalahpahami oleh dunia Barat, khususnya pasca Revolusi Iran yang dipimpin oleh seorang ulama kharismatik, Ali Khomeini pada tahun 1979 yang berhasil menjatuhkan pemerintahan boneka Amerika, Syah Fahlevi, dari tampuk kepemimpinan. Dengan memanfaatkan kekuatan media yang dimiliki, Amerika telah mengkonstruksi citra Islam secara buruk di dunia internasional dan citra buruk tersebut makin mencapai puncaknya

ketika peristiwa 11 September terjadi di Amerika.

Kita tentu tahu bahwa tak satu pun agama mengajarkan pemeluknya untuk melakukan pemaksaan dan kekerasan, apalagi membunuh dan melakukan berbagai aksi biadab yang anti kemanusiaan. Namun dewasa ini, slogan Islam yang dikenal sebagai agama pembawa rahmat bagi semesta alam hanya tinggal nama karena segelintir oknum pemeluknya telah membajak ajaran luhur Islam dalam bentuk aksi vandalisme beragama sehingga mereduksi makna Islam yang sesungguhnya. Para pelaku aksi tersebut terkadang menggunakan justifikasi ayat-ayat tertentu yang ada di dalam kitab suci yang diterpetasikan secara tekstual dan rigid dan juga didukung oleh preseden sejarah masa lalu yang dianggap sebagai zaman ideal sebagai legitimasi atas aksi-aksi mereka. Fenomena tersebut dewasa ini dikenal sebagai fenomena radikalisme. Tulisan ini hadir untuk mengelaborasi pertanyaan berikut ini: (1) Bagaimana sejarah munculnya fenomena radikalisme dalam Islam dan bagaimana karakteristik dan dinamika di dalamnya? (2) Langkah apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh radikalisme Islam?

Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam isu radikalisme dan juga dapat menjadi bahan untuk pemetaan gerakan Islam di Indonesia

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga ia memuat hal yang bersifat deskriptif. Data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait dengan isu radikalisme. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan proses, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

A. RADIKALISME ISLAM: CIRI DAN KARAKTERISTIKNYA

Istilah radikalisme berasal dari bahasa latin *radix* yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris, kata *radical* berarti ekstrim, revolusioner, menyeluruh, fanatik, sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau ekstrim. Pengertian paham radikalisme keagamaan memang tidak selalu identik dengan aksi-aksi kekerasan karena dalam kenyataannya, ada banyak kelompok yang dianggap radikal, namun mereka hanya radikal sebatas ideologi dan pemikiran, namun mereka tidak menggunakan cara-cara yang ekstrim dan vandalis. Namun, ada juga kelompok yang memang menghalalkan segala cara ekstrim dalam memperjuangkan faham keagamaannya. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah radikalisme merujuk pada sikap atau ketidakpuasan seseorang atau kelompok terhadap *status quo* dan tuntutan perubahan yang mendasar terhadap sesuatu yang sudah mapan (Nuh, 2009: 36).

Istilah *radikalisme* terkadang sering dipertukarkan dengan istilah ekstrimisme Islam, integrisme, revivalisme, dan islamisme (Abdullah, 2016: 3) dan juga Islam politik (Hasan, 2012). Namun, istilah radikalisme paling sering digunakan secara bergantian dengan istilah fundamentalisme (Abdullah, 2016: 3). Istilah fundamentalisme adalah suatu istilah yang lahir dalam dunia Protestan di abad 20 yang ditandai dengan adanya perlawanan yang mengatasnamakan agama terhadap produk modernitas yang dianggap telah menghancurkan kesucian agama. Pandangan ini menganggap bahwa ajaran agama yang terhimpun dalam Al-Kitab adalah sesuatu yang telah final, sehingga harus dijalankan dengan penuh ketaatan karena Al-Kitab sama sekali tak mengandung kesalahan (Barr, 1996: 1). Lebih lanjut, Barr menuturkan bahwa, fundamentalisme Kristen juga menaruh kebencian yang mendalam pada teologi modern karena kerangka epistemologinya

cenderung menggunakan metode studi kritik modern, sehingga menghilangkan supremasi Al-Kitab.

Karen Amrstrong (2011: 470) menuturkan bahwa salah satu karakteristik dari fundamentalisme Kristen, yakni para pendukungnya sering mengalami rasa keterancaman terhadap berbagai gagasan baru karena dianggap dapat menyerang kesucian dan kemapanan agama mereka. Itulah sebabnya kelompok fundamentalis cenderung sangat defensif dan tertutup. Untuk melawan pemahaman yang dianggap melenceng, para kaum fundamentalis menempuh berbagai cara, yakni dengan berkampanye melarang pengajaran evolusi di sekolah-sekolah dan juga berkampanye mengutuk demokrasi, feminisme, dan praktik aborsi yang dianggap sebagai produk modernitas. Mereka tak segan memaksa, bila perlu menggunakan jalan kekerasan untuk menegaskan keyakinan dan pandangan mereka, misalnya dengan membunuh para dokter dan perawat yang bekerja di klinik aborsi. Landasan mereka dalam melakukan aksi-aksi tersebut dimotivasi oleh keyakinan bahwa doktrin Al-Kitab telah final, sehingga setiap ayat harus ditafsirkan secara ketat dan tekstual.

Karakteristik fundamentalisme Kristen lainnya, yakni anti pada keragaman dan cenderung memberi pelabelan negatif terhadap liyan, misalnya kaum Islam dan Yahudi dianggap sebagai penghuni neraka dan sebagian dari kaum fundamentalis menganggap bahwa para penganut Hindu, Buddha, dan Tao sebagai pengikut iblis (Armstrong, 2011: 470). Armstrong (2011) melanjutkan, bahwa dalam mempertahankan keyakinan dan pandangannya, para kaum fundamentalis Kristen sangat selektif dalam membaca kitab suci, sehingga Armstrong dengan tegas menyatakan bahwa, “dalam segala bentuknya fundamentalisme adalah iman yang sangat reduktif.” Mereka hanya mengutip ajaran-ajaran yang dapat mendukung tindakan mereka, namun

mengabaikan ajaran-ajaran yang menuntun pada kebaikan dan perdamaian, semisal khutbah Yesus di atas bukit, yang menyuruh para pengikutnya untuk menyayangi musuh, memberi pipi yang lain, dan tidak menghakimi orang lain.

Fenomena fundamentalisme agama dewasa ini memang bukan hanya menjadi karakter khas kaum Protestan saja, melainkan juga menjadi karakter khas seluruh agama, termasuk Islam. Salah satu faktor penyebab munculnya gejala tersebut adalah adanya pembacaan yang tekstual dan rigid terhadap teks kitab suci. Para penganjurnya cenderung memahami teks secara apa adanya dan mengabaikan konteks historis dan latar belakang kultural dari teks tersebut. Demi menegaskan apa yang diyakini, para pendukung fundamentalisme Islam sering mengabaikan ajaran-ajaran Al-Quran yang memerintahkan tiap kaum Muslim untuk menyebarkan cinta, toleransi dan perdamaian, sebaliknya mereka hanya mengutip ayat-ayat yang dapat membenarkan aksi kekerasan mereka.

Bila menilik ke belakang, faktor yang melatarbelakangi lahirnya fundamentalisme kontemporer di dunia Islam tidak bersifat tunggal yang semata-mata disebabkan oleh pembacaan yang tekstual terhadap teks kitab suci, tetapi juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal. Lahirnya fenomena fundamentalisme di tahun 1960-an di Timur Tengah disebabkan oleh adanya berbagai rentetan peristiwa penting yang ‘memaksa’ kaum muslim menjadi radikal, seperti adanya kekalahan masyarakat Arab dalam perang enam hari melawan Israel serta kegagalan ideologi nasionalisme dan sosialisme Barat mendapatkan tempat di hati masyarakat Arab, sehingga mendorong kembali lahirnya semangat agama sebagai sebuah identitas, yang berujung pada lahirnya gerakan fundamentalisme Islam.

Kebijakan negara-negara Barat yang dianggap mengintervensi kedaulatan negara-negara Timur Tengah juga makin memantik

munculnya gejolak fundamentalisme Islam. Umat Muslim menuduh Amerika dan Barat saling bersekongkol untuk menggulingkan pemerintahan yang sah kemudian menggantinya dengan pemerintahan boneka Barat demi memuluskan kepentingannya di Timur Tengah. Penggulingan Muhammad Mosadeq oleh Syah Muhammad Reza Pahlevi yang didukung oleh CIA dan intelijen Inggris adalah satu contoh nyata intervensi Barat di Timur Tengah. Intervensi tersebut telah menghancurkan semangat, harga diri, dan kebanggaan masyarakat Timur Tengah pada negerinya.

Kegagalan komunitas internasional untuk meringankan beban masyarakat Palestina makin membuat umat Muslim Timur Tengah menjadi tidak percaya lagi pada proses politik yang bergulir selama ini. Adanya standar ganda yang dilakukan oleh Barat dengan membanggakan demokrasi dan kebebasan di satu sisi dan di sisi lain mendukung dan melegitimasi pemerintahan yang diktator, seperti Syah dan Saddam Husain, makin meradikalisasi paham keislaman mereka, sehingga ideologi fundamentalisme Islam tumbuh menjadi ideologi populer di zaman itu. Tak dapat dilupakan juga bahwa fundamentalisme Islam tumbuh karena Gamal Abdul Nasser, pemimpin Mesir kala itu, menahan dan memenjarakan ribuan aktivis Ikhwanul Muslimin (IM), -termasuk di dalamnya adalah Sayyid Qutb- tanpa melalui proses pengadilan. Di dalam penjara, para aktivis disiksa dengan keji. Penjara bukannya menjerakan para aktivis IM, tetapi malah makin membuat mereka menjadi semakin radikal dalam melawan segala sesuatu yang dianggap *jahiliyah*, seperti Nasser, Barat, Yahudi, Kristen, sosialis, kapitalis, dan komunis (Armstrong, 2011).

Kelompok Islam fundamentalis dan para pendukungnya biasanya tak segan merusak dan menghancurkan berbagai fasilitas publik, seperti kedutaan besar, tempat wisata, pusat hiburan, dan seluruh simbol-simbol modernitas yang dianggap sebagai

representasi dunia Barat dengan dalih jihad untuk menegakkan Islam. Mereka memiliki kecenderungan anti pada Barat karena mereka memiliki keyakinan yang kuat pada teori konspirasi bahwa Barat memiliki agenda tersembunyi untuk menghancurkan Islam. Mereka juga meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya peradaban yang mampu menyaingi peradaban Barat, sehingga Barat yang mewarisi peradaban Judeo-Kristen, akan melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi tumbuhnya kekuatan Islam.

Berdasarkan interpretasi yang tekstual dan subjektif terhadap kitab suci, para pendukung fundamentalisme Islam cenderung sangat resisten terhadap kaum Yahudi dan Kristen yang mereka asosiasikan sebagai bagian dari Barat. Mereka juga menganggap bahwa kaum Yahudi dan Kristen adalah kelompok yang terkutuk karena memiliki agenda untuk merayu dan mengajak Muslim menjadi pengikut mereka. Bila tak bisa melakukan pengrusakan, para pendukung fundamentalisme Islam cenderung memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain. Mereka cenderung anti pada keragaman pendapat dan juga anti terhadap dialog. Mereka hanya menganggap bahwa keyakinannya yang paling benar, sedangkan keyakinan orang lain dianggap sesat dan bid'ah.

Karakteristik fundamentalisme Islam lainnya adalah para pendukungnya senang menggunakan label dan isu agama dalam aksinya, meskipun -bila dilihat secara kritis dan mendalam- sebenarnya isu-isu yang dibawa lebih banyak condong pada ideologi politik yang berorientasi kekuasaan dibandingkan wacana keagamaan. Para pendukung fundamentalisme Islam memiliki impian yang besar untuk merebut kembali kejayaan Islam di masa lalu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi dan kaum salaf terdahulu. Untuk itu, para pendukung fundamentalisme Islam memilih untuk memperjuangkan formalisasi syariat Islam sebagai hukum positif negara karena syariat

Islam dianggap sebagai sesuatu yang telah lengkap dan cocok untuk berbagai situasi dan kondisi.

Ketika berbicara tentang fundamentalisme Islam, para sarjana menyadari bahwa istilah tersebut sangat problematik, karena secara harfiah istilah ini merujuk pada pentingnya setiap pengikut agama tunduk dan patuh pada ajaran dan prinsip dasar agamanya. Namun, dewasa ini, makna fundamentalisme cenderung direduksi semata-mata hanya diartikan sebagai tertutupnya kitab suci terhadap berbagai penafsiran baru.

Agar tak terjebak dalam kompleksitas fundamentalisme (baca: radikalisme), maka kita harus melihat istilah fundamentalisme ini dengan bijak dan seimbang karena corak fundamentalisme sesungguhnya tidak tunggal melainkan beragam dan berlapis-lapis. Ada gerakan fundamentalis yang dalam aksinya, tak segan, menggunakan pendekatan yang agresif dan semi-militeristik terhadap pihak-pihak yang dianggapnya sesat dan menyimpang. Namun, ada juga gerakan fundamentalis yang menggunakan pendekatan yang gradual-pragmatis, baik melalui aksi oposisi parlementer maupun ekstra-parlementer yang sifatnya terukur. Kesemuanya memang berbeda dari segi model dan metode perjuangan, namun pada dasarnya kesemuanya saling melengkapi dalam sebuah komunitas epistemik yang memiliki agenda dan tujuan yang sama, yakni mempurifikasi agama dari berbagai gagasan non-Islami, mempertahankan tafsiran teks kitab suci secara rigid dan tekstual, dan memperjuangkan formalisasi ajaran Islam dalam hukum positif negara.

B. AKAR RADIKALISME DALAM SEJARAH PERJALANAN ISLAM

Fenomena radikalisme yang mengemuka dewasa ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah perjalanan Islam, melainkan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu yang dalam batas tertentu, masih memiliki beberapa kesamaan karakteristik, misalnya

para pendukung radikalisme Islam cenderung sangat tekstual terhadap penafsiran kitab suci dan juga juga tak segan memaksakan apa yang menjadi keyakinannya, bila perlu dengan menggunakan cara-cara yang vandalis, terhadap mereka yang dianggap kafir atau menyimpang dari doktrin keagamaan yang mereka pahami. Secara historis, kaum Khawarij merupakan salah satu contoh awal kelompok keagamaan yang menggunakan kekerasan atas nama Islam.

Khawarij berasal dari akar kata *kharaja*, artinya keluar. Mula-mula, kaum Khawarij adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib, namun dalam perjalanannya, kaum Khawarij membelot dan menjadi oposisi Ali. Konon, terjadi suatu peristiwa besar di mana khalifah Utsman Bin Affan mati terbunuh. Sebagian kaum Muslimin akhirnya memutuskan untuk memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Khalifah Utsman. Namun, keluarga Utsman yang diwakili Muawiyah, memprotes dan menuntut agar pemilihan khalifah ditunda terlebih dahulu karena menurut Muawiyah, mencari dalang pembunuhan Utsman jauh lebih penting dibandingkan mengadakan suksesi kepemimpinan baru.

Buntut dari protes tersebut akhirnya memicu konflik besar antara kubu Muawiyah dan kubu Ali. Hal ini kemudian mengakibatkan pecahnya perang Shiffin. Perang tersebut sebenarnya sudah hampir dimenangkan oleh kubu Ali, namun kubu Muawiyah memilih berdamai. Untuk merealisasikan perdamaian tersebut, Muawiyah mengirimkan juru bicaranya untuk menemui Ali dan Ali pun menyetujui perjanjian damai tersebut. Namun, di dalam barisan kubu Ali, ternyata tidak semua menyetujui keputusan yang telah ditetapkan oleh Ali. Mereka yang mendukung keputusan Ali kemudian dikenal sebagai Syi'ah, yang secara harfiah berarti kelompok pendukung Ali, sedangkan mereka yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut adalah kaum Khawarij, yang secara harfiah berarti mereka yang keluar dari kubu Ali.

Kaum Khawarij kecewa pada Ali karena menerima perjanjian damai dengan Muawiyah, padahal menurutnya, Muawiyah harus diperangi sampai tunduk. Menurut Azyumardi Azra (1999: 91), dalam mendukung aksinya, kaum Khawarij menggunakan landasan beberapa ayat Al-Quran, yakni surat al-Hujuraat (49) ayat 9 yang menyatakan bahwa *“jika dua kelompok kaum Muslim bertikai, maka damaikanlah mereka, namun jika salah satunya menolak, maka kelompok itu harus diperangi sampai mereka kembali ke jalan Allah.”* Mereka juga menggunakan surat al-Anfal (8) ayat 39-40 yang menyatakan: *“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan Penolong.”* Mereka juga menggunakan surat Al-Ma'idah (5) ayat 44 yang berbunyi: *“Barangsiapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah kafir”*. Dengan berlandaskan ayat-ayat tersebut, tanpa kompromi, mereka menuduh Ali, Muawiyah dan para pendukungnya telah kafir alias telah keluar dari Islam, sehingga darahnya halal untuk dibunuh. Seorang pengikut Khawarij yang bernama Abd Rahman Ibnu Muljam akhirnya berhasil membunuh Ali ketika waktu salat Subuh. Peristiwa tersebut kemudian akhirnya menciptakan perpecahan besar-besaran dalam tubuh umat Islam.

Setelah memisahkan diri dari kubu Ali, kaum Khawarij kemudian mendirikan komunitas yang menjalankan doktrin Islam dengan ketat dan harfiah. Mereka mengadopsi pola jihad yang radikal dan militan. Untuk menjalankan misinya, mereka mengasingkan diri dari masyarakat umum. Mereka kemudian mengatur strategi untuk memerangi pihak-pihak yang dianggapnya sebagai musuh alias kafir dengan mengatasnamakan Tuhan, karena bagi mereka dunia ini terdiri atas dua kutub ekstrim, yakni iman dan kafir, muslim dan non-muslim.

Sejarah kaum Khawarij ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai salah satu contoh awal kelompok radikal dalam kubu Sunni. Namun, radikalisme beragama sebenarnya tidak hanya terjadi dalam kubu Sunni saja, melainkan juga terjadi dalam kubu Syi'ah. Kaum Assassin adalah salah satu komunitas pembunuh yang terkenal di abad 11-12, yang merupakan bagian dari kelompok rahasia Ismailiyah. Mereka melakukan aksinya diinspirasi oleh pandangan messianik. Mereka hidup dalam komunitas rahasia dan dikomandoi orang para pemimpin yang memerintah dari benteng di Gunung Alamut di Persia Utara. Salah satu target teror mereka adalah para anggota dinasti Abbasiyah, yakni para jenderal, ulama, dan juga para pangeran dari dinasti tersebut.

Meskipun kelompok Khawarij dan Assassin saat ini telah punah secara institusional, namun pola dan paradigma teologis mereka masih menjadi prototipe kelompok radikal saat ini. Khusus bagi kelompok Khawarij yang merupakan bagian dari kaum Sunni, benih-benih radikalisme yang mereka tinggalkan, telah tumbuh kembali dengan subur dewasa ini. Hal ini tampak pada gerakan-gerakan Islam radikal yang menggunakan doktrin Islam secara kaku dan harfiah dan dalam batas tertentu menghalalkan pembunuhan atas mereka yang dianggapnya sebagai kafir.

Beberapa abad setelah era munculnya era khawarij, benih-benih radikalisme bertransformasi kembali dalam bentuk gerakan Wahabi¹. Disebut Wahabi karena gerakan ini dipelopori oleh seorang ulama yang bernama ibn Abd al-Wahhab (1703-1791). Pada awalnya, ibn Abd al-Wahhab mempelajari akidah dan hukum Islam di Mekkah dan menjadikan Ibnu Taimiyah

¹ Istilah Wahabi adalah istilah yang digunakan oleh para sarjana, khususnya dari Barat untuk menamai ajaran yang dibawa oleh ibn Abd al-Wahhab. Istilah ini sangat problematis karena Ibn Abd al-Wahhab sendiri tak pernah menamai ajarannya sebagai ajaran Wahabi. Para pendukung ajaran Ibn Abd al-Wahhab lebih senang menamai kelompoknya sebagai Al-Muwahiddun sebagai bentuk komitmen kuat mereka terhadap ajaran tauhid.

sebagai salah satu teladan dan referensi utama dalam mempertegas pendiriannya pada Islam. Semangat ibn Abd al-Wahhab dalam mempelajari ajaran Islam pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kekecewaannya atas kemunduran Islam pada waktu itu, yang ditandai dengan adanya kemerosotan moral dan spiritual serta menjamurnya praktik-praktik penyembahan kepada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat yang banyak dilakukan oleh para penganut sufi.

Dengan bermodalkan paham tauhid yang ketat dan penafsiran Al-Quran dan Sunnah yang kaku dan harfiah serta penekanan yang tegas pada riwayat penghancuran berhala-berhala di dalam Kabah oleh Nabi dan pengikutnya, para pengikut paham keislaman ibn Abd al-Wahhab -tanpa pandang bulu- telah menghancurkan tempat-tempat suci dan keramat karena dianggap sebagai sarang berhala. Makam sahabat dan keluarga Nabi yang berada di Mekkah dan Madinah juga mereka hancurkan. Mereka juga ikut menghancurkan tempat ziarah kaum Syi'ah di Karbala di mana terdapat makam Hussein, cucu kesayangan Nabi. Pengrusakan atas situs suci tersebut telah melahirkan kebencian yang mendalam oleh kaum Syiah kepada kaum Wahabi hingga saat ini. Ibn Abd al-Wahhab juga mencela kabilah-kabilah dan komunitas-komunitas muslim lainnya yang tak sejalan dengan pemahamannya sebagai seorang musyrik. Kaum Wahabi meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak islami adalah kekafiran yang harus dilawan dengan jihad atau perang suci.

Untuk memperkuat posisi dan kekuatan Wahabi di jazirah Arab, ibn Abd al-Wahhab menggabungkan semangat keagamaan, militer, dan politik dengan berkoalisi dengan Muhammad ibn Saud, kepala sebuah kabilah lokal, untuk mendirikan sebuah kerajaan yang saat ini kita kenal sebagai kerajaan Arab Saudi. Ibnu Saud menggunakan paham Wahabi sebagai cita-cita religius demi melegitimasi aksinya menaklukkan seluruh kabilah lokal yang ada di jazirah Arab sekaligus menjadikan

mereka sebagai penganut paham Islam yang puritan. Mereka yang menolak pemahaman keislaman Wahabi akan dianggap sebagai kafir yang darahnya halal untuk dibunuh.

Kerajaan Arab Saudi yang didirikan Ibnu Saud semakin hari semakin kuat karena para keturunan Ibnu Saud dan ibn Abd al-Wahhab saling terlibat dalam hubungan kawin-mawin. Demi memperkuat otoritas kerajaan, mereka kemudian menggabungkan antara politik dan agama, di mana posisi raja secara berurutan diduduki oleh keturunan keluarga Saud dan para pemegang otoritas agama kebanyakan berasal dari para keturunan al-Wahhab. Kerajaan Arab Saudi juga memperkuat otoritas mereka dengan menyebarkan dan mengeksport paham Wahabi ke seluruh dunia dengan uang yang berlimpah, khususnya pasca *oil-booming* di tahun 1970-an dengan menawarkan berbagai bantuan dana untuk membangun masjid, mensponsori pembagian buku-buku, dan juga pemberian komisi kepada para imam dan ulama tanpa main-main, demi mensosialisasikan ideologi Islam versi Wahabi.

Arab Saudi juga banyak membiayai kelompok-kelompok Islam yang berkembang pesat pada tahun 1980-an untuk menandingi ideologi Islam revolusioner yang ditawarkan Ali Khomeini dari Iran, yang selama ini menjadi seteru utama Arab Saudi di Timur Tengah. Arab Saudi juga membuka hubungan yang lebih dekat dengan dua gerakan Islam besar, seperti Ikhwanul Muslimin dan Jamaat-i-Islami dan dengan petrodollar yang dimiliki, Arab Saudi membantu pendanaan atas penerjemahan dan penyebaran karya-karya ideologi Islam, seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Maulana Maududi ke berbagai penjuru dunia. Hal tersebut dilakukan agar Arab Saudi dapat membentuk citra bahwa negara tersebut adalah tanah air Islam, pelindung dua tempat suci dalam Islam, yakni Makkah dan Madinah, dan juga menjadi juru bicara Islam di dunia internasional (Esposito, 2010: 125).

C. RADIKALISME ISLAM DI ZAMAN KONTEMPORER

Menurut Oliver Roy, genealogi gerakan Islam radikal di zaman kontemporer ini berawal dari dua gerakan Islam, yakni Ikhwanul Muslimin dan Jamaat-i-Islami (Hilmy, 2010: 6). Namun, dalam perjalanannya, anggota dari organisasi ini terpecah dalam berbagai faksi karena pandangan politik mereka sudah tak sepenuhnya sejalan dengan garis perjuangan organisasi. Untuk mengelaborasi lebih jauh, saya akan menuliskan sejarah, perkembangan, dan pengaruh gerakan-gerakan tersebut terhadap pemikiran Islam secara umum di level global dan juga di level yang lebih kecil, yakni di Indonesia.

1. Ikhwanul Muslimin

Secara harfiah organisasi ini berarti persaudaraan sesama Muslim. Organisasi ini pertama kali didirikan pada tahun 1928 di Ismailiyah, sebelah timur laut Kairo oleh seorang guru, Hasan Al-Banna. Lahirnya organisasi yang didirikan oleh Al-Banna ini disebabkan oleh adanya krisis sosial politik dan juga adanya pengaruh kolonialisme Inggris dan Perancis yang telah mencengkeram tatanan sosial-politik di negeri tersebut. Di samping itu, memupusnya semangat nasionalisme di masyarakat Mesir dan juga apatisisme kaum ulama terhadap adanya krisis moral dan agama, makin membulatkan tekad Al-Banna untuk mendirikan suatu organisasi keagamaan alternatif yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Mesir kala itu. Al-Banna dengan Ikhwanul Muslimin-nya muncul membawa angin perubahan dengan berbagai gagasan yang diusungnya. Menurut Usman Jafar (2012: 60-61) ada dua gagasan besar yang ditekankan oleh Al-Banna, yakni *pertama*, ia menegaskan bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna yang telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dll. Oleh karena itu, untuk meraih kembali kejayaan Islam yang pernah terjadi di masa lalu, maka umat Islam harus

kembali secara total ke ajaran Islam dengan menjunjung tinggi ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, tanpa perlu meniru Barat.

Kedua, agar dapat keluar dari cengkeraman penjajahan Barat, maka umat Islam harus bersungguh-sungguh mengaplikasikan hukum dan prinsip Islam dan juga menyebarkan dakwah secara bijaksana dalam level negara. Untuk mengintrodusir gagasan-gagasannya, Al-Banna pada awalnya memulai dakwahnya melalui kedai-kedai kopi dengan sasaran anak muda karena menurutnya anak muda cenderung berpikir idealis dan anti-kemapanan, sehingga mereka mudah menerima gagasan Al-Banna. Ia kurang fokus berdakwah di masjid karena lebih banyak dipenuhi oleh orang tua renta. Metode dakwah Al-Banna banyak menarik hati kaum muda karena pendekatan yang ia gunakan sangat lembut dan bersahabat. Al-Banna juga memiliki suara yang merdu dan memiliki kemampuan yang hebat dan apik dalam membakar semangat kaum muda, sehingga membuat Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi tumbuh menjadi organisasi Islam modern dengan jumlah anggota yang cukup besar.

Dalam waktu sepuluh tahun, IM berhasil melakukan reformasi moral dan sosial dengan mendirikan sekolah, klinik, masjid, bidang industri, dan balai-balai pertemuan. Di usia dua puluh tahun, IM melebarkan sayap dengan mendirikan lebih dari dua puluh ribu cabang yang tersebar di seluruh penjuru Mesir dengan keanggotaan yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah, menengah, mahasiswa, profesional, hingga kalangan angkatan bersenjata. Salah satu metode yang digunakan IM dalam merekrut anggota, yakni melalui metode *tarbiyah* (secara harfiah: pendidikan), atau sering disebut sistem sel (*usroh/ keluarga*) yang terdiri dari sepuluh anggota dengan seorang pemimpin. Peran utama setiap sel adalah melakukan pertemuan mingguan untuk mengajarkan berbagai hal yang berhubungan dengan ajaran Islam. Sel juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan

kesalehan pribadi dan juga memperkuat rasa solidaritas dan soliditas antar masing-masing anggota. Setiap anggota dari sistem sel tersebut, berkewajiban untuk memberikan aneka bantuan, termasuk kesejahteraan kepada anggota lainnya, karena di mata mereka, setiap anggota sel harus diperlakukan layaknya saudara.

Dalam perjalanannya, IM turut terlibat aktif dalam berbagai pergolakan politik di Mesir, dengan menentang pendudukan Inggris di Mesir dan pendudukan Israel di Palestina. Momentum tersebut membuka peluang bagi IM untuk menunjukkan kecenderungan politiknya yang pro terhadap pendirian negara Islam. Melihat hal tersebut, rezim yang berkuasa menjadi kebakaran jenggot. IM dilarang melakukan berbagai aktivitas politik. Para tokoh-tokohnya ditangkap satu persatu. Posisi IM dalam konstelasi politik Mesir menjadi terpinggirkan karena serangkaian pembunuhan yang terjadi atas pejabat di Mesir, cenderung dialamatkan pada anggota-anggotanya. Tak lama berselang, IM akhirnya dibubarkan dan beberapa anggotanya melarikan diri dari Mesir, termasuk Al-Banna. Namun, pada tanggal 12 februari 1949, Al-Banna akhirnya terbunuh oleh polisi rahasia Mesir.

Pasca kematian Al-Banna, tongkat estafet kepemimpinan IM beralih ke Hasan Ismail Al-Hudhaibi (memimpin dari tahun 1948-1954) yang dikenal moderat layaknya Al-Banna. Namun setelah itu, era kepemimpinan IM beralih ke Sayyid Qutb. Di era Qutb, terjadi pergeseran yang cukup besar dalam pola perjuangan IM. Di era kepemimpinan Al-Banna dan Hudhaibi, pendekatan yang digunakan IM cenderung moderat, gradual dan persuasif melalui media dakwah dan pendidikan, sedangkan di era kepemimpinan Qutb, IM lebih menggunakan pendekatan yang radikal dan agresif.

Sebelum menjadi radikal, pada awalnya, Qutb adalah sosok yang moderat. Ia pernah tinggal dan belajar di Amerika. Namun, pemikiran Qutb perlahan berubah

menjadi radikal karena ia kecewa melihat demoralisasi yang terjadi di masyarakat Amerika, seperti menjamurnya kebebasan seks, penyalahgunaan alkohol, dan rasisme. Selain itu, munculnya pemikiran radikal pada Qutb juga disebabkan oleh kekecewaannya terhadap masyarakat Amerika yang cenderung anti-Arab dan juga mendukung berdirinya negara Israel (Esposito, 2003: 69; Nashir, 2007: 172-173).

Radikalisme Qutb mencapai puncaknya ketika ia kerap mengkritik Nasser. Di mata Qutb, Nasser adalah pemimpin yang sekuler dan pro-Barat. Selain dianggap pro-Barat, Nasser dikritik oleh Qutb karena ia cenderung diperlakukan bak dewa oleh negara, sehingga masyarakat lebih mematuhi perintah Nasser dibandingkan mematuhi perintah Tuhan beserta hukum-hukumNya (Fealy, 2005: 39). Karena kebenciannya itu, rezim akhirnya menjebloskan Qutb di dalam penjara dengan serangkaian penyiksaan keji. Di penjara, Qutb rajin menuliskan hasil pemikirannya dalam bentuk buku. Salah satu pernyataan Qutb yang sangat kontroversial hingga saat ini dan sering dikutip oleh para aktivis Islam radikal dalam menjalankan aksinya adalah "*masyarakat Islam sekarang berada dalam keadaan jahiliyah, persis seperti yang terjadi pada masa permulaan Islam. Semua yang berada di sekeliling kita adalah jahiliyah*". Jahiliyah di mata Qutb merujuk pada Barat dan juga terhadap kaum Muslim itu sendiri, khususnya Gamal Abd Nasser.

Dalam "manifesto" politiknya yang terkenal, yakni *Ma'alim fi Al-Thariq* dituliskan Qutb ketika mendekam di penjara, ia berpendapat bahwa masyarakat jahiliyah harus dilawan dan dihancurkan. Oleh karena itu, Qutb menganjurkan pentingnya mensucikan diri dari berbagai ide-ide jahiliyah yang dapat merusak kaum Muslim. Qutb dengan gencar mempromosikan dan memperjuangkan ideologi Islam sebagai antitesis terhadap ideologi Barat yang sekuler. Pendekatan yang dilakukan Qutb dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya memang cenderung lebih radikal dibanding

pendahulunya, Al-Banna. Namun, sayang Qutb tak sempat menyaksikan bagaimana gagasannya menjadi populer di negerinya cintai karena rezim yang berkuasa keburu memberikan hukuman mati pada Qutb.

Dewasa ini, IM terpecah dalam dua kelompok besar, yakni *al-madrassatul quthbiyah* yang dipengaruhi oleh gagasan Qutb yang menekankan perjuangan dakwah hingga menggunakan kekerasan dan juga *al-madrasah al-hudaibiyah*, yakni pendekatan dakwah yang bersifat parlementer (Mufid, 2009: 22-23). Kelompok pertama melahirkan faksi-faksi jihadis, seperti Jama'atul Muslimin yang dipimpin oleh Sukri Mustofa, Jamaah Islamiyah yang dipimpin oleh Omar Abdurrahman, dan juga Jihad Islam yang dipimpin oleh Aiman al-Zawahiri. Faksi-faksi ini kemudian berkoalisi dengan kelompok Salafi yang dipimpin oleh Osama bin Laden, sehingga melahirkan Al-Qaeda. Berbeda dengan kelompok pertama yang fokus menjadi jihadis, kelompok kedua konsisten melakukan dakwah Islam melalui jalur parlementer. Faksi *al-madrasah al-hudaibiyah* inilah yang kemudian berkembang di Indonesia dan bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

2. Jamaat-i-Islami

Jamaat-i-Islami adalah sebuah partai politik Islam di Pakistan yang pertama kali didirikan pada tanggal 21 Agustus 1941 oleh seorang jurnalis dan teolog yang bernama Abu'l A'la Maududi, ketika kaum muslim India sedang menggagas dan memperjuangkan berdirinya sebuah negara baru yang tidak lagi terikat dengan negara India, yang kelak bernama Pakistan. Pada awalnya, Jamaat-i-Islami cenderung memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas umat Islam di India -termasuk partai Liga Muslim- perihal berdirinya negara Pakistan. Namun, setelah terjadi krisis dan pergolakan politik yang berkepanjangan di India, Maududi beserta para pendukungnya di Jamaat-i-Islami mengubah keputusannya untuk mendukung eksistensi negara Pakistan sebagai negara merdeka, hingga akhirnya Pakistan berhasil

mencapai kemerdekaannya dari India pada tanggal 15 Agustus 1947.

Ketika Pakistan telah berdiri menjadi negara yang merdeka, Jamaat-i-Islami berkeinginan untuk mendirikan negara yang berlandaskan Islam dan mengkritik Liga Muslim yang dianggapnya sebagai partai yang tidak islami, sekuler, dan hanya mengeksploitasi agama. Sejak itu, Jamaat-i-Islami menunjukkan watak radikalnya dengan menentang rezim yang berkuasa karena dianggap telah menetapkan hukum yang tidak bersumber dari Allah. Selain mengkritik Liga Muslim yang dianggap tak islami, Maududi mengembangkan fanatisme etnik dan juga memperluas gagasan bahwa suatu pergerakan harus meniru contoh perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Maududi berpendapat bahwa suatu gerakan politik harus berdasarkan ideologi Islam untuk menegakkan kedaulatan Tuhan.

Dalam anggaran dasar partai, sangat gamblang disebutkan bahwa Jamaat-i-Islami memiliki tujuan untuk “*menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi*” dan “*menjadikan Islam sebagai sistem dan jalan hidup di atas dunia*” (Nashir, 2007: 178). Bagi Maududi, kedua tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar partai harus diwujudkan secara nyata karena manusia modern cenderung lebih mengagungkan kedaulatan manusia dibandingkan kedaulatan Tuhan dalam mengatur kehidupan di muka bumi ini. Sebagai akibat tidak didahulukannya kedaulatan Tuhan, dunia ini tanpa henti-hentinya dirundung oleh berbagai bencana. Dengan kata lain, selama ini manusia lebih memilih menggunakan hukum jahiliyah untuk mengatur jalannya negara dibandingkan menggunakan hukum ilahi. Oleh karena itu, menurut Maududi, sudah saatnya sistem Islam dijadikan satu-satunya solusi agar kaum muslim dapat terlepas dari segala cengkeraman masalah karena Islam adalah sistem yang lengkap dan sempurna yang telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

Perjuangan partai dalam menegakkan hukum Allah akhirnya berhasil dicapai pada tahun 1956 di mana syariat Islam berhasil menjadi konstitusi negara Pakistan. Sejak itu, Jamaat-i-Islami intens melibatkan diri dalam percaturan politik di Pakistan. Namun, ketika Ayyub Khan mengambil alih kekuasaan, rezim yang berkuasa menutup seluruh akses menuju islamisasi negara. Maududi kemudian dipenjarakan oleh rezim. Meskipun demikian, Maududi dan pengikutnya tidak tinggal diam. Para pengikut Maududi kemudian mengambil keputusan yang ekstrim dengan menggulingkan Ayyub Khan dari tampuk kepemimpinan agar dapat mewujudkan kembali visi keislaman mereka dalam berpolitik.

Kejayaan Jamaat-i-Islami mencapai puncaknya ketika Zia ul-Haq berhasil memimpin negeri tersebut. Partai ini berhasil menjadi bagian dari kekuasaan. Namun dalam perjalanannya, performa politik dari partai ini cenderung berjalan biasa-biasa saja. Singkatnya, visi keislaman yang diusung Maududi melalui jamaat-i-Islami hingga saat ini masih sangat populer dan masih sering dijadikan referensi utama oleh para pejuang Islam politik dalam meraih cita-cita mereka mewujudkan syariat Islam secara total dalam konstitusi negara.

D. GELIAT ISLAM RADIKAL DI INDONESIA

Pluralitas agama yang ada di Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dipungkiri. Pluralitas ini telah berlangsung sejak lama dan diwarnai oleh berbagai dinamika yang cenderung berjalan harmonis dan kondusif. Sebelum Islam masuk, penduduk nusantara telah memeluk agama Hindu-Buddha dan agama-agama tersebut menjadi agama kerajaan. Namun, setelah jalur perdagangan menyentuh nusantara, para penduduk nusantara berbondong-bondong memeluk Islam. Kenyataan menunjukkan bahwa transisi dari Hindu-Buddha menuju Islam tidak memicu pergolakan yang hebat, sebaliknya transisi ini berjalan secara natural,

apalagi Islam yang masuk di Indonesia cenderung berpola sufistik, sehingga sangat akomodatif terhadap sinkretisme budaya lokal dan asketisme Hindu-Buddha.

Setelah kedatangan penjajah Belanda di abad 16, agama Kristen Protestan dan Katolik menjadi salah satu agama yang mewarnai pluralitas agama di Indonesia. Agama ini pada awalnya lebih banyak berpusat di daerah luar Jawa, namun agama ini baru berkembang di Jawa pada abad 18. Keberadaan agama-agama ini membuat posisi Indonesia menjadi unik, khususnya bila dibandingkan dengan Timur Tengah karena secara historis, Timur Tengah hampir tidak bersentuhan dengan tradisi Hindu-Buddha (Abdullah, 2011: 6).

Dapat dikatakan bahwa, corak Islam yang ada di Indonesia hingga saat ini adalah corak Islam yang moderat di mana NU dan Muhammadiyah adalah motor utamanya. Kedua ormas tersebut sangat konsen dalam gerakan dakwah, pendidikan, dan kesehatan. Bagi NU dan Muhammadiyah, Islam dan Pancasila adalah dua hal yang tidak bertentangan, namun saling mendukung satu sama lain karena nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, mengandung nilai universal Islam. Oleh karena itu, bagi NU dan Muhammadiyah, Pancasila adalah ideologi yang telah final di negeri ini.

Namun belakangan ini, khususnya pasca kejatuhan rezim Orde Baru, fenomena radikalisme agama menjadi sangat marak dan telah mengoyak serta meruntuhkan wibawa bangsa dan negeri ini. Di zaman Orde Baru, fenomena radikalisme sulit tumbuh dan berkembang, karena rezim Orde baru dengan kekuatan aparatusnya, sangat ketat mengontrol gerak-gerik seluruh ormas yang dicurigai membawa misi radikalisme agama. Organisasi-organisasi yang selama ini menjadi motor radikalisme agama di Indonesia awalnya hanya muncul di kampus pada pertengahan tahun 70-an dalam bentuk kegiatan keagamaan atau sering disebut Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang

berfokus pada peningkatan kesalehan pribadi. Karena kuatnya represi pemerintah terhadap aktivitas politik kampus di pertengahan tahun 1970 hingga 1980-an, maka para aktivis dakwah kampus memilih untuk melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi yang sering disebut *usroh*.

Kegiatan ini dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 6-10 orang dan dipimpin oleh seorang pembimbing (*murabbi*). Kegiatan yang mereka lakukan sering dikamufilase sebagai kegiatan rutin mahasiswa, misalnya pengajian atau kelompok studi yang membahas pemikiran tokoh-tokoh Islam seperti, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan lain-lain. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena mereka khawatir akan represi dari rezim Orde Baru yang sangat anti dengan gerakan keagamaan dan juga berbagai aktivitas politik di kampus akibat dikeluarkannya peraturan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) 1978). Namun, yang membuat para aktivis dakwah makin bersemangat dan percaya diri dalam meneruskan dakwah dan aktivisme mereka dalam menggeluti pemikiran Islam politik ditengah ancaman represi, yakni adanya momentum revolusi Iran pada tahun 1979 yang berhasil menjatuhkan pemerintahan boneka Barat di Iran yang dipimpin oleh Syah Pahlevi.

Di zaman pasca Orde Baru, di mana kran demokrasi terbuka dengan bebas, ormas-ormas yang sering dicap radikal, turut mengambil bagian dalam dinamika demokrasi Indonesia. Umumnya mereka tidak mendirikan partai politik, namun tetap menjalin kerjasama dengan kader partai khususnya partai yang bercorak islamis yang memiliki kecenderungan terhadap pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI). Namun, ada juga yang menolak memperjuangkan aspirasinya melalui jalur demokrasi (politik kepartaian) dan memilih golput dalam setiap pemilu karena hal tersebut dianggap sebagai produk

demokrasi kufur yang tak bisa disandingkan dengan hukum Tuhan yang telah lengkap dan sempurna, sebagaimana yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir (HT). Sebagai alternatif, HT bersama para proponennya menawarkan sistem khilafah islamiyah yang sifatnya transnasional. Bagi HT, sistem khilafah islamiyah merupakan sistem yang paling cocok diterapkan di seluruh penjuru dunia karena sistem ini berasal dari Tuhan, sehingga kebenarannya tak perlu lagi diragukan.

Secara garis besar, Masdar Hilmy (2010: 154-158) mencatat bahwa ada lima argumen yang sering digunakan oleh para proponent Islam radikal untuk menjatuhkan kewibawaan demokrasi dengan menggunakan argumen demokrasi itu sendiri. *Pertama*, mereka berpendapat bahwa para pendukung demokrasi selalu menganggap para kaum radikal sebagai pemegang kebenaran, tetapi kenyataannya, para pendukung demokrasi juga sering mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pemegang kebenaran dengan menuduh para pendukung syariat Islam sebagai orang yang radikal, militan, dan teroris. *Kedua*, mereka mengkritik kebebasan berekspresi yang diagungkan Barat. Mereka mencontohkan inkonsistensi negara penganjur demokrasi, seperti Perancis yang dalam semboyannya menjunjung tinggi, *liberty, egalitarianism, and fraternity*, namun secara kontradiktif negara ini tidak melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Pelarangan terhadap penggunaan jilbab, salib, dan simbol-simbol agama lainnya di ruang publik oleh pemerintah Perancis merupakan bukti nyata adanya pelanggaran atas nilai kebebasan itu sendiri.

Ketiga, mereka mengkritik konsep multikulturalisme yang diagungkan oleh Barat. Menurut mereka selama ini kaum minoritas Islam di Barat cenderung dipaksa berasimilasi dengan kebudayaan Barat yang Kristen, padahal ketika umat Kristen mengalami hal yang sama di negeri yang bermayoritas muslim, maka kaum muslim akan dianggap

tidak respek dan tidak toleran terhadap kaum minoritas. *Keempat*, mereka mengkritik sistem politik elektoral. Menurut mereka negara Barat, sering melakukan *double standard* dalam pelaksanaan nilai-nilai demokrasi. Negara Barat sering menggunakan sistem politik elektoral dalam bentuk pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin, namun kenyataannya ketika partai yang berideologi Islam berpotensi memenangkan pemilu, maka negara Barat akan mengintervensi hasil pemilu. Hal ini pernah terjadi di Aljazair ketika Barat tiba-tiba menganulir kemenangan Islamic Salvation Front (FIS) yang telah di depan mata.

Kelima, mereka juga mengkritik sistem sekularisme yang dilakukan oleh Barat. Menurut mereka sistem sekularisme yang diadopsi Barat selama ini sangat ketat pada pemisahan antara negara dan agama di mana agama menjadi hal privat bagi setiap warga negara dan negara tak punya hak untuk mengintervensi kehidupan keagamaan warganya. Namun kenyataannya negara Barat melakukan pelanggaran terhadap penggunaan jilbab, sehingga mereka mengingkari prinsip sekularisme karena telah melakukan intervensi terhadap keyakinan warganya.

Di era pasca reformasi, terdapat beberapa ormas Islam yang sering menjadi aktor di balik aksi-aksi radikal di Indonesia, seperti melakukan aksi persekusi terhadap kelompok minoritas, mengambil peran sebagai polisi moral untuk melakukan aksi main hakim sendiri terhadap hal-hal yang dianggap immoral, mendominasi ruang publik dengan tafsir Islam yang anti terhadap keragaman dan dalam batas tertentu melegalkan aksi kekerasan atas nama agama. Dan yang paling penting adalah mereka aktif mengkampanyekan syariat Islam sebagai hukum tertinggi negara yang dipahami dalam kerangka tekstual dan kaku, sehingga memungkirkan ijtihad politik para pendiri bangsa (di mana dalamnya adalah kaum ulama) yang telah sepakat bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar negara. Mereka itu

adalah Hizbut Tahrir (HT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI).

1. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

HT adalah sebuah organisasi Islam transnasional yang awalnya didirikan di Yerusalem pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang mantan aktivis Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini berpusat di Yerusalem dan Yordania. Organisasi ini mengusung ide pan-Islamisme yang ingin mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu melalui konsep khilafah islamiyah di seluruh penjuru dunia. HT merupakan partai politik di mana Islam menjasi *mabda* atau ideologinya. Hizbut Tahrir pada prinsipnya adalah kelompok politik yang berorientasi kekuasaan, bukan kelompok yang hanya berdasarkan pada kerohanian semata, bukan juga lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan (akademisi), dan bukan pula lembaga sosial (Nashir, 2007: 178). Di Indonesia, HT tampak seperti organisasi sosial-kemasyarakatan yang tidak mengambil bagian sebagai partai politik dalam sistem politik modern. Beberapa pihak sebetulnya telah mendorong agar HT bertransformasi menjadi salah satu partai politik yang mewarnai dinamika perpolitikan negeri ini. Namun, kelompok ini tampaknya memiliki pengertian yang tersendiri tentang arti partai politik.

Bagi HT, berpolitik bukanlah sesuatu yang tabu dan terlarang, melainkan sesuatu yang harus dilakukan demi menegakkan *amar maruf nahi munkar* di tengah masyarakat. *Amar maruf nahi munkar* tersebut terwujud dalam bentuk mengawasi para penguasa dan menyampaikan nasihat kepadanya agar dapat menjalankan perintah Islam. Bagi HT tugas menjalankan *amar maruf nahi munkar* ini seyogianya menjadi tugas partai politik Islam yang menjunjung tinggi nilai dan hukum Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

HT lahir karena didorong adanya kegelisahan terhadap kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran. Kemunduran

tersebut terjadi karena umat Islam tak lagi menjadikan Islam sebagai basis nilai dan ideologi dalam seluruh aspek kehidupan, sebaliknya mereka menjadikan sistem kapitalisme Barat sebagai solusi atas berbagai masalah kekinian. HT muncul sebagai organisasi alternatif yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu sebagaimana yang telah dicapai oleh Nabi dan para khalifah-khalifah terdahulu, dengan menawarkan sistem khilafah yang sifatnya lintas negara (transnasional).

Bagi HT, memilih dan membaiaat seorang khalifah untuk memimpin *daulah islamiyah* secara global adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam agar keislaman mereka menjadi *kaffah*. Itulah sebabnya, dalam setiap dakwahnya, HT sering menekankan urgensi ditegakkannya *khilafah islamiyah* di seluruh penjuru dunia dibanding membahas adanya pluralitas penafsiran ulama dan aliran mazhab dalam Islam. HT sangat getol melakukan kritik tajam terhadap berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan politik dan kemudian menawarkan konsep khilafah sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi seluruh permasalahan, seperti dalam slogan “*selamatkan Indonesia dengan syariah*” atau “*saatnya khalifah memimpin dunia*”. HT mengutuk keras ideologi lain di luar Islam, seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, nasionalisme, patriotisme, demokrasi, *freemasonry* dan isme-isme lainnya karena hal tersebut tersebut hanya dianggap sebagai produk buatan manusia (Nashir, 2007: 409).

Metode dakwah yang dilakukan oleh HT adalah berusaha mengikuti *thariqah* (jalan) perjuangan dakwah Nabi yang melalui tiga tahapan, yakni pertama, *tatsqif* adalah proses pembinaan dan pencetakan kader-kader untuk mengimplementasikan pemikiran HT dalam rangka membentuk sebuah partai. Kedua, *tafa'ul* adalah proses interaksi dengan umat agar dapat mengemban di dakwah, sehingga mereka dapat menjadikan doktrin Islam sebagai basis nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, *istilamu al-hukmi* adalah

penerimaan kekuasaan untuk menerapkan Islam secara kaffah dan juga menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Dewasa ini, cabang HT tersebar di seluruh penjuru dunia mulai di Timur Tengah, Amerika, Eropa hingga ke Asia. Keberadaan HT sering ditentang oleh rezim yang berkuasa karena gerakan ini sangat konfrontatif terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan juga sangat getol ingin mengubah sistem yang telah ada secara radikal menjadi sistem khilafah. HT saat ini telah dilarang di berbagai negara termasuk di Arab Saudi, Turki, Malaysia, dan terbaru adalah di Indonesia.

Masuknya HT di Indonesia berawal pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa, putra Abdullah bin Nuh yang merupakan pengasuh Pesantren Al Ghazali Bogor dan juga melalui Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang warga Lebanon yang bermigrasi ke Australia yang kemudian tinggal di Indonesia (Rahmat, 2005: 100). Ketika menempuh studi di Yordania, Mustofa selalu terlibat aktif dalam kegiatan bawah tanah HT. Ketertarikannya pada organisasi ini diawali atas ketertarikannya pada gagasan pendiri HT, Taqiyuddin An-Nabhani, yang sering ia baca di dalam karya-karyanya. Mustofa sebelumnya telah diperkenalkan dengan karya An-Nabhani oleh ayahnya, Abdullah bin Nuh sebelum ke Yordania. Kecintaannya terhadap pemikiran An-Nabhani tumbuh semakin kuat ketika berada di Yordania karena ia sering bertemu dengan para aktivis HT. Dari perjumpaan itulah, Mustofa mendapatkan karya-karya An-Nabhani secara lengkap. Menurutnya, An-Nabhani adalah sosok mujtahid besar abad ini. Selain itu, ketertarikan Mustofa pada ajaran HT yang dirintis oleh An-Nabhani disebabkan oleh pola pendekatan gerakan ini cenderung menggunakan pola *halaqah* dibandingkan menggunakan kekerasan, apalagi mengangkat senjata (Rahmat, 2005: 101).

Selain Mustofa, Abdurrahman Al-Baghdadi merupakan aktor penting yang mempromosikan organisasi HT di Indonesia. Al-Baghdadi sendiri telah aktif menjadi

bagian dari gerakan HT di Libanon sejak ia berusia 15 tahun, karena keluarganya juga aktif dalam gerakan ini. Al-Baghdadi bersama keluarganya kemudian pindah ke Australia menjadi warga negara Australia. Al-Baghdadi berkenalan dengan Abdullah bin Nuh ketika Abdullah menginap di rumah keluarga Al-Baghdadi di Australia. Saat itu, Abdullah mengunjungi anaknya yang menempuh studi di Australia. Abdullah sangat kagum dengan gagasan-gagasan yang dimiliki oleh Al-Baghdadi. Ia kemudian mengajak Al-Baghdadi pindah ke Indonesia dan kemudian mendaulatnya menjadi anak angkat. Ketika tinggal di Bogor, Al-Baghdadi membantu Abdullah mengembangkan pesantren Al-Ghazali Bogor. Di Bogor, Al-Baghdadi banyak berinteraksi dengan mahasiswa IPB yang aktif dalam kegiatan keislaman di Mesjid Al-Ghifari di area kampus IPB. Karena interaksi itulah, Al-Baghdadi dapat dengan mudah memperkenalkan pemikiran HT kepada para aktivis masjid di kampus tersebut (Rahmat, 2005: 101).

Ketika Mustofa pulang ke Indonesia dalam rangka cuti semester, ia memperkenalkan pemikiran HT kepada para mahasiswa yang sering mengaji kepada ayahnya dan juga memberikan buku-buku yang ditulis oleh para ideolog HT. Salah satu mahasiswa yang pertama kali diperkenalkan dengan pemikiran HT dan kemudian menjadi motor utama pergerakan di masa-masa awal adalah Fathul Hidayah (Rahmat, 2005: 101). Ketika di Indonesia, Mustofa sangat sibuk memenuhi berbagai undangan sebagai pembicara dalam diskusi HT, karena pada saat itu, banyak anak muda menjadi tertarik dengan gagasan dan ideologi HT.

Tak lama kemudian, ayahnya Mustofa, Abdullah bin Nuh memperkenalkan Mustofa pada Al-Baghdadi. Dari perkenalan itulah, geliat HT semakin tumbuh dan berkembang melalui *halaqah* (pengajian kecil) yang dilakukan baik di masjid kampus IPB, pesantren milik ayah Mustofa, dan juga di rumah-rumah mahasiswa. Ketika Mustofa harus kembali ke Yordania melanjutkan studinya, seluruh geliat HT kemudian

dilanjutkan oleh kader-kader yang telah dididik oleh Mustofa, seperti Fathul Hidayat dibantu teman-temannya seperti Asep Saifullah, Adian Husaini, dan Hasan Rifai Al-faridi di bawah bimbingan Al-Baghdadi dan dibantu oleh Abas Aula dan Abdul Hannan yang merupakan alumni dari Madinah (Rahmat, 2005: 102).

Satu hal yang menarik dari HT adalah para anggotanya sangat anti pada demokrasi, namun sering menggunakan argumen demokrasi agar tetap eksis. Namun HT menolak untuk bertransformasi menjadi partai politik yang merupakan produk demokrasi, padahal untuk mengubah sistem secara konstitusional, maka langkah yang paling realistis adalah membentuk partai politik kemudian memperjuangkan agenda politiknya di ruang parlemen. Bagi HT, mengambil bagian dalam proses demokrasi adalah haram karena dalam segala bentuknya, demokrasi adalah sistem kufur. Namun, HT tidak menganjurkan pendekatan yang revolusioner melalui kudeta untuk menggulingkan pemerintah. Para proponent HT memilih konsisten untuk melakukan pendekatan ekstra-parlementer dalam mengkritik pemerintah dan sistem yang ada, sembari tetap mensosialisasikan gagasan mereka di tengah masyarakat melalui sistem kaderisasi dari akar rumput.

Dalam memperjuangkan agendanya terhadap perjuangan khilafah Islamiyah, maka HT menjalin kerjasama dengan berbagai ormas Islam yang memiliki orientasi ideologi yang radikal, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan berbagai ormas lainnya yang pro terhadap formalisasi Syariat Islam. Mereka juga saling berkoalisi melawan gagasan yang dianggap non-islami, khususnya yang datang dari Barat, seperti sekularisme, pluralisme, dan liberalisme atau sering disingkat sepilis. Para proponent Islam radikal menolak sekularisme karena paham ini menganjurkan terjadinya pemisahan antara negara dan gereja yang sesungguhnya bertentangan dengan doktrin Islam sebagai agama dan negara (*Islam ad din wa dawlah*). Bagi mereka, mengadopsi

prinsip sekularisme berarti meminggirkan peran agama dalam ruang publik, padahal ajaran Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan.

Selain menolak sekularisme, mereka juga menolak paham liberalisme karena dianggap sebagai paham yang menggugat autensitas Al-Quran dan Sunnah, sehingga dapat melemahkan akidah kaum Muslim. Penolakan terhadap liberalisme juga disebabkan oleh adanya pandangan yang menganggap bahwa liberalisme lebih mengedepankan penggunaan akal dibanding tuntunan wahyu dalam memahami doktrin Islam. Lebih jauh, penolakan terhadap liberalisme dilakukan karena paham ini identik dengan kebebasan tanpa batas. Mereka mencontohkan bahwa negara yang menjunjung tinggi liberalisme cenderung menghalalkan dan menganggap lumrah praktik homoseksual dan nikah beda agama, sehingga peran agama menjadi terpinggirkan.

Gagasan lain yang ditentang oleh HT dan proponen Islam radikal adalah pluralisme. Menurut mereka, dalam pemahaman kaum pluralis, semua agama dianggap sebagai sesuatu yang relatif, sehingga klaim kebenaran suatu agama tak dapat diterima. Hal ini berdampak pada hilangnya supremasi agama Islam yang menuntut implementasi syariah Islam secara menyeluruh dalam level negara. Sebagai wujud protes terhadap paham sepilis, para proponen Islam radikal selalu menyerukan perlawanan terhadap NGO dan organisasi yang mempromosikan nilai-nilai ini, salah satunya adalah Jaringan Islam Liberal (JIL). JIL dianggap sebagai perpanjangan tangan Barat yang bertugas untuk merusak dan menghancurkan Islam dari dalam. Tekad para kaum Islam radikal untuk menghancurkan JIL menjadi semakin kuat pasca keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Juli 2005 yang mengharamkan sekularisme, pluralisme, dan liberalism. Fatwa inilah yang kemudian dijadikan justifikasi oleh para kaum radikal

untuk melarang dan menentang tumbuhnya gagasan tersebut di masyarakat.

Untuk mencuri hati kaum Muslim, para proponen HT sering menggunakan isu anti Barat, anti kapitalisme, anti Kristen dan Yahudi baik dalam orasi politik maupun dalam publikasi artikel di majalah dan website mereka. Mereka sering melakukan provokasi bahwa kemunduran yang dialami oleh umat Islam tidak lain disebabkan oleh adanya intervensi Barat dan sekutunya secara terstruktur, sistematis, dan massif karena Islam dianggap sebagai satu-satunya ancaman yang dapat menyaingi peradaban Barat.

Dalam mempromosikan gagasannya di masyarakat, HT menempuh berbagai cara, yakni menyelenggarakan seminar, konferensi, tabligh akbar, melakukan publikasi melalui majalah dan website hingga berdemonstrasi turun ke jalan. HT bahkan berani menempuh cara yang 'kotor' demi memperluas pengaruhnya dengan jalan melakukan penyusupan dalam tubuh NU dan Muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai ormas Islam moderat yang mendukung Pancasila sebagai ideologi dasar negara, dengan berbagai modus operandi, misalnya dengan menyusup menjadi pengurus di kedua ormas (dan juga sayap ormas) tersebut dan juga mengambil alih masjid yang selama ini dikelola oleh kedua ormas tersebut lalu mengganti warna NU dan Muhammadiyah menjadi warna HT yang mendukung berdirinya kekhalifahan Islam yang transnasional (Qodir, 2009: 106).

Semenjak HT telah dilarang di Indonesia, tentu geliat HT akan menjadi sulit untuk dideteksi. Kemungkinan besar, para pendukungnya akan menyusup dalam ormas NU dan Muhammadiyah untuk memperkuat pengaruhnya di dalam kedua organisasi tersebut. Selain itu, mereka kemungkinan akan membuat organisasi baru dengan nama yang berbeda, tetapi ideologinya masih tetap khas HT dan mereka cenderung akan semakin militan menyebarkan gagasannya dengan memanfaatkan media yang ada.

2. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Organisasi MMI pertama kali berdiri di Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus tahun 2000. Tokoh yang terkenal dari organisasi ini adalah Irfan S. Awwas dan Abu Bakar Baasyir. Baasyir dikenal sebagai salah satu pendiri Pesantren Ngruki, Surakarta. Baasyir dikenal sebagai tokoh kontroversial karena ia dikait-kaitkan dengan Jamaah Islamiyah yang merupakan jaringan Al Qaeda di Asia Tenggara. Baasyir juga dikaitkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas beberapa peristiwa peledakan bom di Indonesia, meskipun hal tersebut belum bisa dibuktikan di pengadilan.

Sebelum menjadi pimpinan MMI, Baasyir bersama sahabatnya Abdullah Sungkar pernah dipenjara oleh rezim Orde Baru. Mereka dituduh telah menyebarkan paham Islam radikal yang oleh rezim Orde Baru disebut sebagai ekstrim kanan, karena mereka menentang asas tunggal Pancasila dan melarang santrinya hormat bendera karena dianggap syirik. Ketika tinggal di Malaysia, Baasyir menghabiskan waktunya untuk berdakwah sambil membangun jaringan di Malaysia, Singapura, dan Filipina yang sering dikait-kaitkan dengan jaringan Al Qaeda di Asia Tenggara (Hilmy, 2010: 114).

MMI memiliki kemiripan dengan HT di mana keduanya sangat getol memperjuangkan pendirian negara Islam, namun perbedaannya hanya terletak pada metode gerakan di mana HT lebih condong mendirikan kekhalifahan Islam yang sifatnya transnasional, sedangkan MMI lebih condong menegakkan syariat Islam sebagai hukum positif dalam level negara-bangsa dengan menggunakan jalur perjuangan melalui pembangunan wacana politis lewat tulisan, lobi politik pada partai Islam, dan seminar. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Baasyir yang berbunyi sebagai berikut:

“NU, Muhammadiyah, dan lain-lain sudah banyak berperan membina individu dan keluarga. Tapi hasilnya kita rasakan sangat minim. Bukan salah NU dan ormas-ormas

Islam, tapi salahnya pemerintah yang tidak mau memakai hukum Islam. Maka saya katakan, pemerintah itu sekarang merusak moral rakyat. Jadi, pembinaan-pembinaan yang kita lakukan selama ini dirusak oleh kebijaksanaan pemerintah. Jadi kami tinggal memusatkan perhatian dan melakukan Islamisasi pemerintah. Harus pemerintah yang 100% menjalankan hukum Islam, dasarnya Islam. Itu yang kami perjuangkan, dan itu tidak ada tawar menawar” (Mufid, 2009: 18).

Secara teologis, MMI menganut paham *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* dalam jalur salafi. Para anggota MMI sedini mungkin dididik untuk menjadi penceramah, menyebarkan Islam, dan juga menjadi mujahid yang siap membela Islam. Sistem kaderisasi anggota di MMI terdiri atas dua model (Mufid, 2009: 18). Pertama, model organisasi sosial (*tandzim jam'i*) yang mencakup pengajaran tentang tauhid, syahadat, *wala' wa al-barra'* (pembelaan dan permusuhan), *thaghut* (karakter setan), syirik, rukun Islam, fikih jihad, dan fikih qital. Kedua, sistem pondok pesantren yang berusaha untuk menumbuhkan semangat jihad, sehingga kelak para lulusannya dapat menjadi penceramah sekaligus mujahid yang dapat memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam level negara.

Sebelum pecah dan mendirikan organisasi Ansharu al-Tauhid karena adanya perpecahan internal, Baasyir memiliki pandangan tersendiri mengenai demokrasi. Menurutnya, demokrasi adalah agama baru layaknya Kristen, Yahudi, dan Majusi, sehingga siapapun yang menerima konsep demokrasi, maka tauhidnya telah batal karena telah meragukan kesempurnaan ajaran Islam (Mufid, 2009: 18-19).

Demi mewujudkan cita-citanya menegakkan syariat Islam, MMI berkoalisi dengan berbagai pihak, termasuk ormas Islam, partai Islam, dan kader partai nasionalis yang memiliki konsen yang tinggi pada penegakan syariat Islam di Indonesia. Demi menegakkan Islam, MMI bahkan tak segan menggunakan

kekerasan demi menyerang pihak-pihak yang dianggap ingin ‘menghancurkan dan melecehkan’ Islam. Masih teringat jelas pada tahun 2012, MMI memprovokasi berbagai ormas Islam dan juga menekan pucuk pimpinan kampus agar diskusi dan bedah buku *Allah, Liberty, and Love* karya Irshad Manji dibatalkan. Mereka menolak kehadiran Manji, seorang lesbian dari Kanada, di Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) karena dianggap dapat meracuni dan merusak akidah umat Muslim. Kegiatan bedah buku tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh pihak penyelenggara karena mereka mendapat berbagai tekanan dan desakan dari berbagai pihak, khususnya dari pucuk pimpinan kampus.

Tak lama berselang, masih di kota yang sama, MMI kembali menyerang diskusi Irshad Manji yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS). Para aktivis MMI melampiaskan kemarahannya dengan merusak dan menghancurkan fasilitas yang ada di LKIS sambil melukai beberapa tamu yang hadir dalam diskusi tersebut. Alasan penyerangannya kurang lebih sama dengan apa yang mereka lakukan di UGM, yakni mereka ingin mencegah meluasnya pemikiran Manji karena khawatir dapat meracuni dan merusak akidah kaum muslim.

3. Front Pembela Islam (FPI)

FPI pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1998 oleh beberapa tokoh seperti K.H. Cecep Bustomi, Habib Idrus, Habib Rizieq Shihab, dan K.H. Misbahul Anam. Latar belakang berdirinya FPI dikaitkan dengan kondisi sosial politik di Indonesia yang tidak menguntungkan umat Islam. Secara teologis, pemahaman keislaman FPI menganut paham *Ahlu sunnah Wal Jamaah* namun agak berbeda dengan garis Salafi karena FPI banyak berpedoman pada Al-Quran, Hadis, ijma, dan qiyas yang merupakan pandangan populer di kalangan Nahdliyin (Mufid, 2009: 20). Namun ada kecenderungan lain yang tampak, yakni tujuan utama kehadiran FPI adalah ingin mendirikan syariat Islam dalam konstitusi

negara. Itulah sebabnya, Habib Rizieq Shihab dalam berbagai kesempatan selalu memotivasi pengikutnya untuk memperjuangkan kembali pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi negara.

Dapat dikatakan bahwa FPI adalah salah satu ormas yang paling kontroversial di antara ormas Islam radikal lainnya. Bagaimana tidak, ormas ini kerap melakukan aksi vigilantisme demi menegakkan *amar maruf nahi mungkar* versi mereka, seperti melakukan sweeping dan merusak fasilitas di bar, diskotik, tempat lokalisasi dan berbagai tempat hiburan lainnya sebagaimana yang terjadi pada tahun 2004 di mana 500 anggota FPI merusak kafe dan bentrok dengan Forum Masyarakat Kemang. Selain melakukan sweeping terhadap tempat hiburan, FPI juga kerap melakukan sweeping di bulan Ramadhan dengan menyasar dan mengobrak-abrik rumah makan yang buka di siang hari sebagaimana yang pernah terjadi di warung Coto Makassar pada tahun 2011.

Para anggota FPI juga kerap membubarkan berbagai kegiatan yang dianggap melecehkan Islam sebagaimana yang mereka lakukan pada tahun 2005 di mana para anggotanya menyerang acara kontes Miss Waria di gedung Sarinah, Jakarta. Berikutnya, pada tanggal 1 Juni 2006, beberapa laskar FPI menyerbu dan menganiaya para aktivis Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas karena menuduh para aktivis AKKBB melindungi kaum Ahmadiyah yang dianggapnya sesat. FPI bahkan tak segan melakukan aksi pengrusakan terhadap kantor milik pemerintah sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2012 dengan merusak kantor Kemendagri akibat adanya pembatalan Perda Miras.

Di tahun 2014, FPI memobilisasi massanya untuk berdemonstrasi di depan gedung DPRD Jakarta dan Kantor Balaikota Jakarta. Mereka menolak Ahok menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI periode 2014-2019, karena latar belakang Ahok yang beragama Kristen dan beretnis Tionghoa. Menurut pandangan

FPI yang dipengaruhi oleh pandangan tekstual terhadap syariat, umat Islam haram memilih calon pemimpin yang beragama non-muslim karena mereka yang memeluk agama selain Islam dianggap kafir. Oleh karena itu, Ahok tidak layak menjadi gubernur karena ia kafir sekaligus tak mewakili pandangan mayoritas umat Islam di Jakarta. Ketika berdemo, para simpatisan FPI membawa spanduk yang bertuliskan 'Ahok Musuh Islam' sambil meneriakkan takbir *Allahu Akbar* untuk membakar semangat para demonstran. Para simpatisan FPI kemudian melawan blokade yang dilakukan polisi di depan Kantor DPRD Jakarta dan Balaikota, sehingga konflik menjadi tak terelakkan.

Sesaat sebelum pilkada Jakarta di tahun 2017, FPI dan imam besarnya Habib Rizieq Shihab kembali menjadi aktor utama yang menggerakkan massa untuk mendemo Ahok agar segera dijebloskan di penjara pasca keluarnya fatwa MUI yang menganggap Ahok sebagai penista agama. Adanya fatwa sebagai penista agama terhadap Ahok disebabkan oleh adanya pidato Ahok di Pulau Seribu yang menyinggung soal surat Al-Maidah ayat 51 dan bagi kelompok Islam radikal, hal itu dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Akibat adanya fatwa MUI, aksi demo terhadap Ahok berlangsung secara berjilid-jilid di Monas, yang dikenal dengan Aksi Bela Islam 411 dan 212. Karena aksi demo tersebut, Ahok akhirnya kalah dalam kontestasi pilkada Jakarta serta berhasil dijebloskan di penjara. Sejak saat itu, posisi FPI makin diperhitungkan dalam kancah perpolitikan tanah air. Meskipun begitu, FPI tampaknya masih enggan untuk bertransformasi menjadi partai politik sampai saat ini.

Dalam melakukan aksi, ada beberapa kesamaan yang dimiliki oleh kelompok Islam radikal, yakni mereka sering menggunakan politik klaim seakan-akan kelompok mereka mewakili mayoritas umat Islam. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka yakini adalah representasi Islam yang 'benar'. Selain itu, mereka menjadikan slogan *Islam is the only*

solution sebagai inspirasi gerakan karena bagi mereka, Islam adalah sebuah sistem hidup yang sangat lengkap dan komprehensif.

Adanya aksi-aksi radikal yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal telah membawa dampak yang buruk terhadap iklim demokrasi di Indonesia. Iklim demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan pluralitas budaya dan agama tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya karena kelompok Islam radikal cenderung anti terhadap perbedaan. Mereka lebih memilih menggunakan pendekatan konfrontatif dengan menguasai berbagai ruang publik sambil melakukan teror psikologis, baik berupa ancaman maupun berupa aksi-aksi yang vandalis, ketimbang menggunakan pendekatan dialog yang sehat terhadap mereka yang dianggap 'menyimpang'. Akhirnya, tenun kebangsaan dan keragaman yang selama ini telah terajut dengan indah seketika terkoyak. Ironisnya, para petinggi di negeri ini yang seharusnya menjadi front terdepan dalam penegakan konstitusi, tak dapat menahan lajunya arus radikalisme yang semakin hari semakin tumbuh subur.

E. LANGKAH UNTUK MENYIKAPI MELUASNYA PENGARUH ISLAM RADIKAL

Kelompok Islam radikal di Indonesia pada dasarnya telah memiliki pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Meskipun ideologinya terkesan anti terhadap sistem negara yang telah mapan, namun keberadaannya sering dimanfaatkan oleh para pihak khususnya para politisi, baik untuk kepentingan elektoral maupun untuk kepentingan memberangus suatu kelompok yang dianggap bisa mengancam *status quo*. Agar geliat kelompok Islam radikal tidak makin kuat yang pada akhirnya dapat merusak kewibawaan negara dan juga mengoyak rajutan keragaman yang telah eksis di negeri ini, maka perlu diperlukan upaya antisipasi baik sifatnya struktural maupun kultural.

Dari segi pendekatan struktural, negara harus memastikan bahwa penegakan hukum harus menjadi panglima di negeri ini. Negara tidak boleh tunduk pada kelompok Islam radikal. Selama ini, negara cenderung ragu menghukum kelompok Islam radikal tatkala mereka melakukan aksi persekusi dan main hakim sendiri. Pembiaran ini tentu membuat kelompok Islam radikal semakin menjadi-jadi. Negara juga harus memastikan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang dibuat di negeri ini harus bersifat mengayomi dan melindungi seluruh warga negara. Tidak boleh lagi ada perda-perda yang bersifat diskriminatif terhadap minoritas, yang selama ini menjadi pintu masuk bagi kelompok Islam radikal melakukan aksi persekusi di tengah masyarakat. Di samping itu, negara juga harus memastikan bahwa kurikulum keagamaan dan juga organisasi kerohanian yang ada di seluruh institusi pendidikan harus steril dari muatan ajaran keagamaan yang berorientasi radikal. Dan yang paling penting adalah negara harus hadir untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tingginya ketidakadilan dan kemiskinan dapat menjadi medan empuk bagi kelompok Islam radikal untuk menyuntikkan provokasinya di tengah warga, sehingga kepercayaan terhadap negara dapat luntur. Negara juga perlu merangkul kelompok Islam moderat, seperti NU dan Muhammadiyah dan juga kelompok *civil society* lainnya untuk bersama-sama mengarusutamakan ajaran Islam moderat di tengah masyarakat.

Dari segi pendekatan kultural, NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam moderat terbesar di Indonesia harus senantiasa ikhlas dan konsisten membantu negara dalam melakukan konter terhadap Islam radikal. NU dan Muhammadiyah harus senantiasa menjadi garda terdepan dalam merawat keragaman yang ada di Indonesia melalui berbagai pendekatan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Juga penting untuk dilakukan adalah para pendukung kelompok Islam moderat tidak boleh menjadi *silent*

majority. Mereka harus berani melawan aksi-aksi yang dapat mengancam keragaman di negeri ini. Pada dasarnya, kelompok Islam radikal adalah *noisy minority*, namun karena terjadi pembiaran dari kelompok *silent majority* yang umumnya moderat, maka kelompok Islam radikal memanfaatkan peluang ini untuk memperluas pengaruhnya di tengah masyarakat. Setiap elemen masyarakat juga perlu mewarnai ruang publik termasuk media sosial -yang belakangan ini pengaruhnya sangat kuat di masyarakat- dengan konten-konten yang positif agar nalar warga tetap berada di rel yang benar.

IV. KESIMPULAN

Ajaran radikalisme sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah perjalanan Islam. Radikalisme telah eksis sejak masa awal Islam hingga saat ini. Radikalisme berpangkal pada penafsiran yang tekstual dan kaku terhadap kitab suci serta diikuti oleh kepentingan yang sifatnya politis demi perebutan pengaruh.

Tipikal Islam di Indonesia pada dasarnya adalah moderat karena ia banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bercorak sufistik. Namun belakangan ini, corak moderat perlahan terkontaminasi oleh corak radikal yang berasal dari Timur Tengah. Akibatnya, keragaman yang selama ini menjadi identitas keindonesiaan menjadi terancam dengan keberadaan kelompok Islam radikal yang cenderung anti terhadap keragaman dan dialog.

Kelompok Islam radikal yang ada di Indonesia saat ini pada dasarnya tidak monolitik. Masing-masing dari mereka memiliki manhaj dan metode pendekatan yang berbeda, namun mereka memiliki kesamaan cita-cita, yakni sama-sama ingin memformalisasi Syariat Islam sebagai hukum tertinggi dalam konteks bernegara. Dalam aksinya, para pendukung kelompok Islam radikal sering mengklaim bahwa aksi yang mereka lakukan adalah mewakili mayoritas umat Islam. Agar masa depan keragaman di Indonesia dapat terjaga, maka kerjasama

antara negara dan masyarakat dalam mengarusutamakan ajaran Islam moderat harus terus digalakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. (2011). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Abdullah, Anzar. (2016). Gerakan Radikalisme Islam: Perspektif Historis. *Jurnal Addin*, Vol.10, No.1, Februari 2016, 1-28.
- Armstrong, Karen. (2011) *Masa Depan Tuhan: Sanggahan terhadap Fundamentalisme dan Ateisme*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Azra, Azyumardi. (1999). *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Barr, James. (1996). *Fundamentalisme*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Esposito, John L. (2003). *Unholy War: Teror Atas Nama Islam*. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Esposito, John L. (2010). *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*. Bandung: Mizan.
- Fealy, Greg dan Anthony Bubalo. (2005) *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Hasan, Noorhaidi. (2012). *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Hilmy, Masdar. (2010). *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Jafar, Usman. (2012). *Islam dan Politik: Dinamika Pemikiran Politik dalam Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- M. Nuh, Nuhri. (2009). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. VIII, Nomor 30, April- Juni 2009, 35-47.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. (2009). Faham Islam Transnasional dan Proses Demokratisasi di Indonesia. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. VIII, Nomor 30, April- Juni 2009, 8-34.
- Nashir, Haedar. (2007). *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Qodir, Zuly. (2009). *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat, M. Imdadun. (2005). *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.